



**2020 NATIONAL
CONFERENCE**
Virtual Event | 2-3 December 2020



Assurance Framework for Covid 19 and National Economic Recovery Expenditure

..... **Enhancing Communication & Collaboration: Learning From The Pandemic**



Dr. Alexander Zulkarnain, Ak., MM., CIA, CCSA, CSOX, CA, QIA, QGIA

Memperoleh gelar Doktor dalam bidang *Human Resource Management*, Magister Manajemen dalam bidang *Finance*, dan Akuntan.

Bekerja sebagai auditor internal pemerintah dengan jabatan Inspektur pada Itjen Kemenkeu. Berpengalaman melakukan audit dan penugasan asurans lainnya serta konsultasi pada sektor publik dan korporasi.

Pengalaman di sektor publik lebih dari 30 tahun dalam penugasan asurans terkait pelaporan keuangan, kinerja, dan audit tujuan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa, manajemen risiko, pengendalian intern, dan tugas fungsi organisasi, serta penugasan konsultasi di bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pengalaman di sektor korporasi lebih dari 20 tahun menjadi Komite Audit pada salah satu bank terbesar, salah satu bank syariah terbesar, sebuah perusahaan finansial, dan Ketua Dewan Pengawas pada salah satu BLU Pembiayaan Mikro.

Berkhidmat bagi ilmu *accounting*, *finance*, *public sector audit*, dan *internal audit* dengan mengajar paruh waktu di PKN STAN dengan NIDK 8897980018, STIA LAN, IIA Indonesia, dan YPIA.

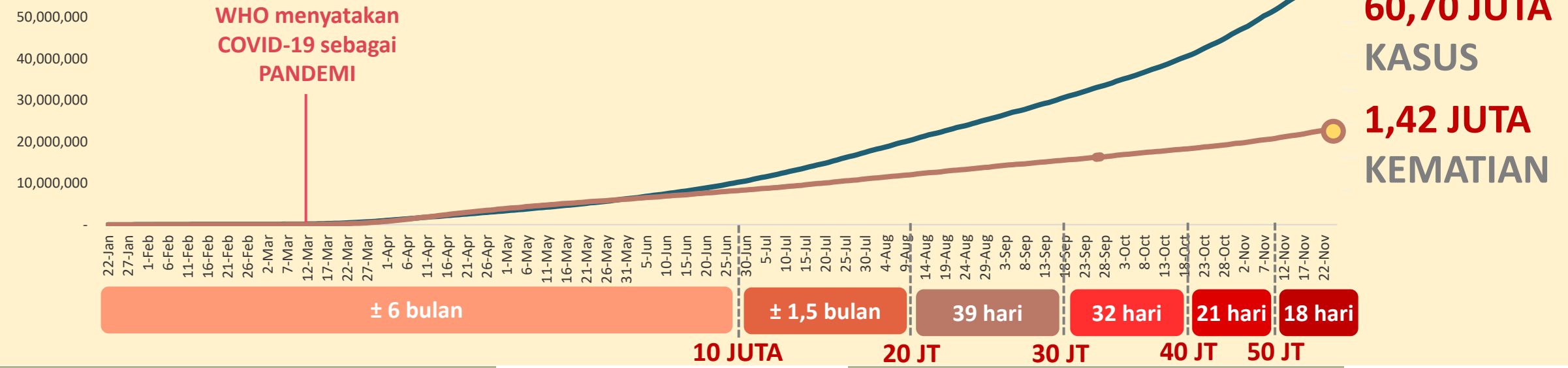
Agenda

1. Perkembangan Pandemi dan Perekonomian
2. Biaya Penanganan COVID-19 dan PEN
3. Realisasi Penanganan COVID-19 dan PEN
4. Audit Universe Penanganan COVID dan PEN- APBN
5. Framework Pengawasan Penanganan COVID-19 dan PEN
6. Pengawasan Itjen Kementerian Keuangan atas Penanganan COVID-19 dan PEN

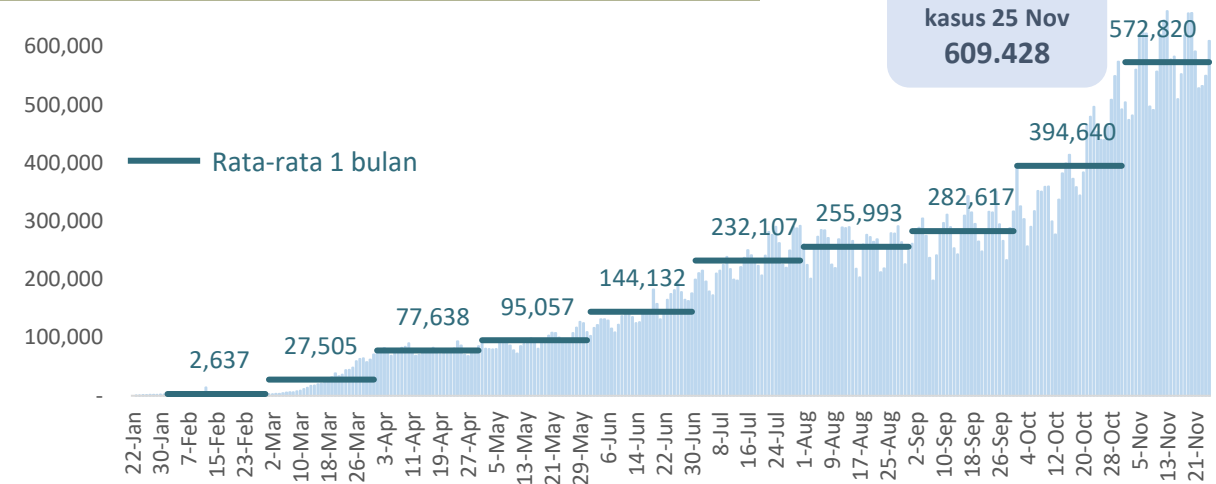
KASUS GLOBAL SEMAKIN TERESKALASI, KETIDAKPASTIAN MASIH TINGGI

Kenaikan kasus harian masih tinggi didorong oleh 2nd wave di Eropa dan 3rd wave terutama di AS (dan Asia)

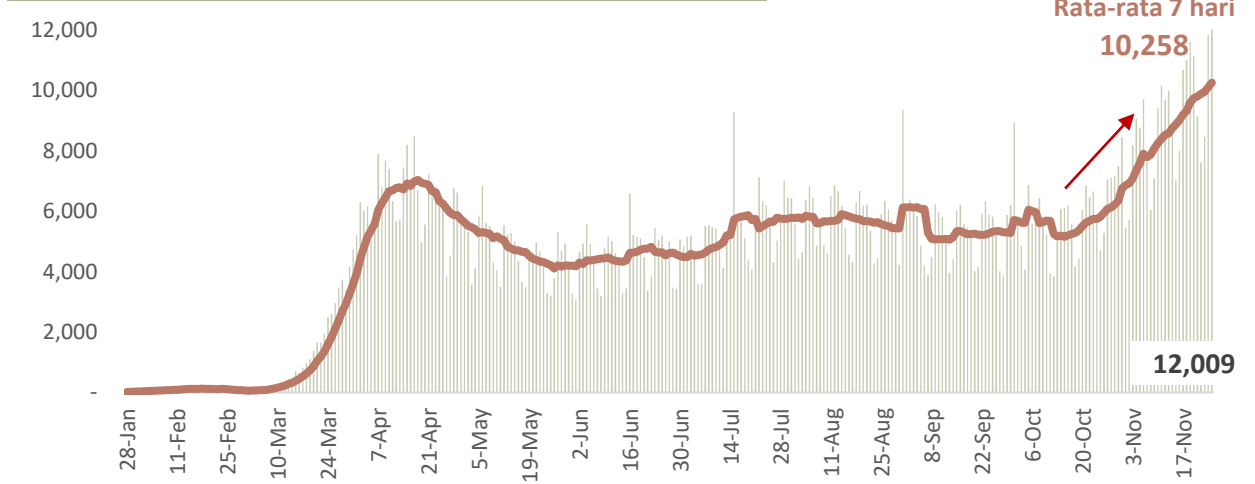
TOTAL KASUS & KEMATIAN KUMULATIF



KASUS BARU PER HARI



KEMATIAN PER HARI



Sumber: worldmeters.info, 25 November 2020

PERTUMBUHAN EKONOMI Q3 2020: MENJADI TITIK BALIK

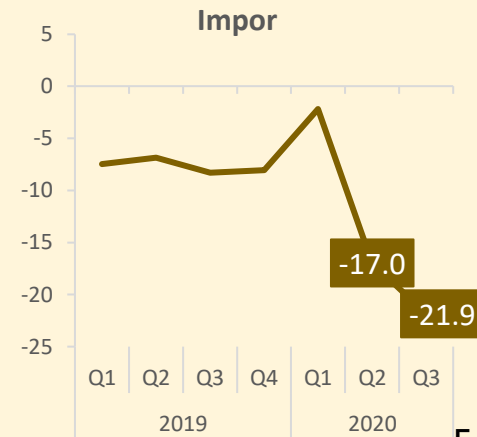
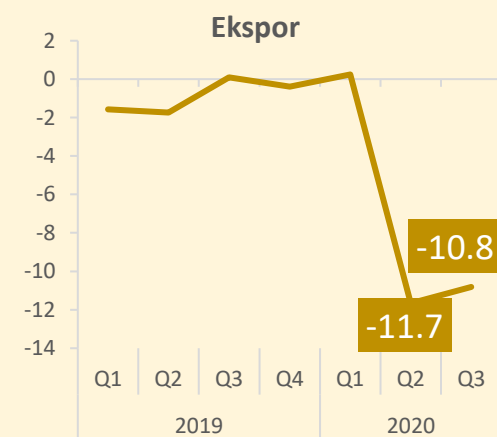
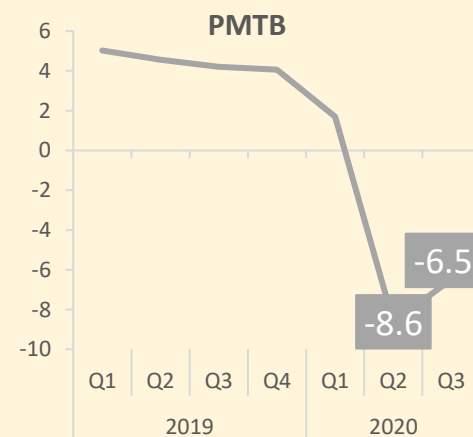
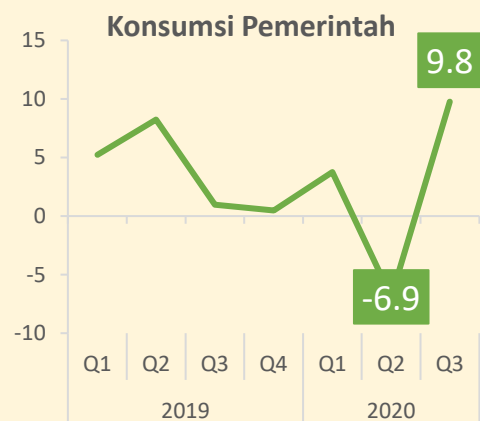
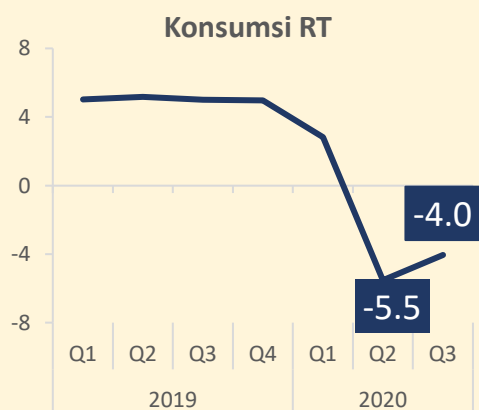
Pertumbuhan Q3 2020 membaik, didorong realisasi Belanja Negara yang meningkat signifikan

PERTUMBUHAN EKONOMI (% , YOY)



- **Semua komponen pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran mengalami peningkatan** didorong peran stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional
- **Konsumsi Pemerintah** tumbuh tinggi didorong kebijakan *countercyclical* akselerasi belanja APBN yang meningkat signifikan
- **Konsumsi RT** mulai menunjukkan perbaikan, terutama didukung oleh **belanja perlindungan sosial yang meningkat tajam**, sementara kelompok menengah-atas masih menunda konsumsinya
- **Investasi** mulai menunjukkan peningkatan terutama oleh komponen investasi kendaraan dan mesin
- Kinerja **Ekspor** sedikit membaik, namun **Impor** mengalami penurunan

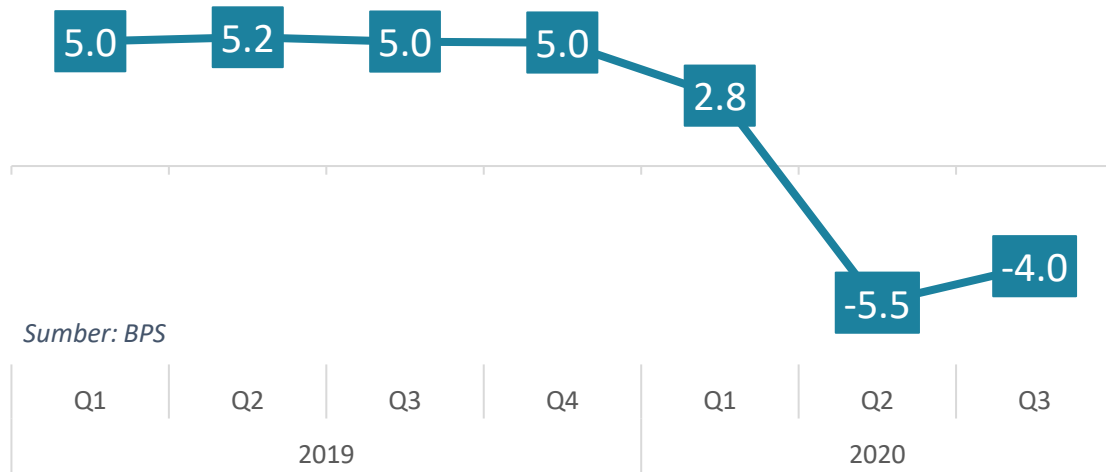
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (% ,yoy)



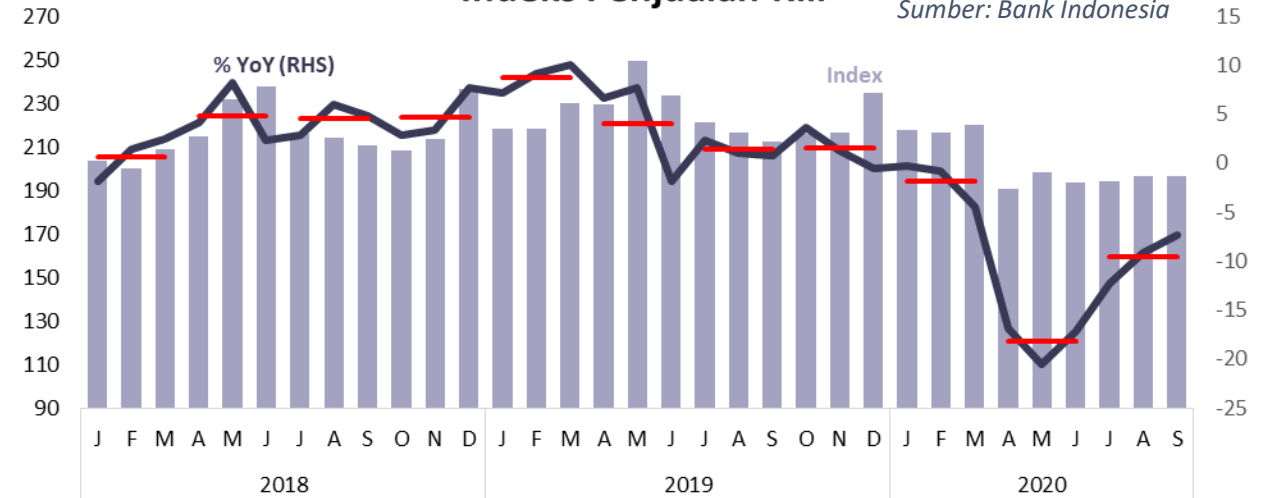
KONSUMSI RUMAH TANGGA MENUNJUKKAN PERBAIKAN

- Konsumsi kebutuhan pokok (makanan & perumahan) relatif stabil didukung belanja Bansos bagi kelompok rentan
- Kebutuhan lainnya mampu menunjukkan pembalikan arah sejalan dengan indikator Indeks Penjualan Riil

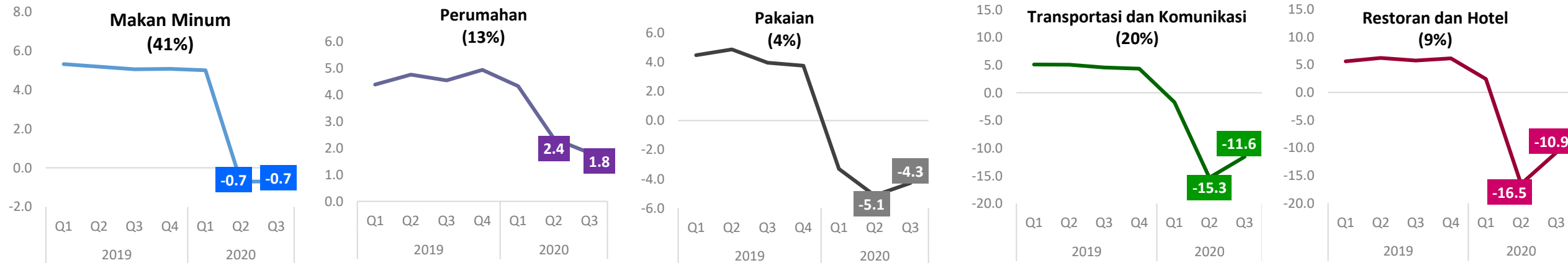
Konsumsi RT (% YoY)



Indeks Penjualan Riil



Kinerja Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga (% YoY)



Konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier sudah menunjukkan *turning point* walau masih lemah

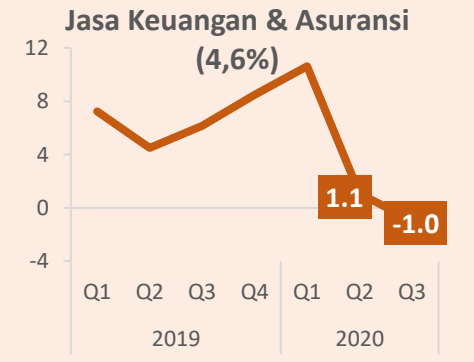
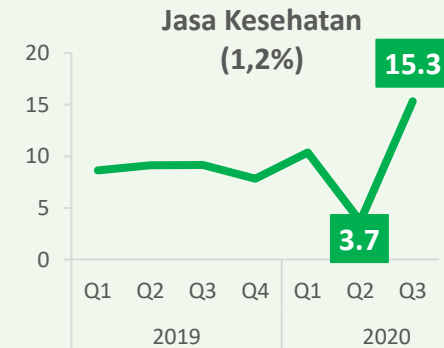
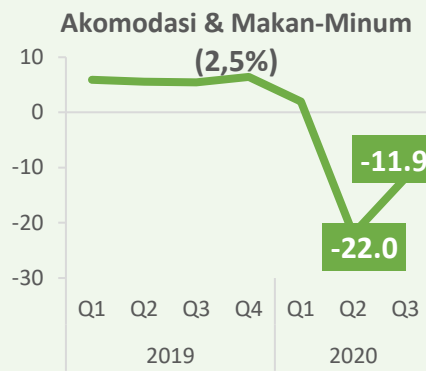
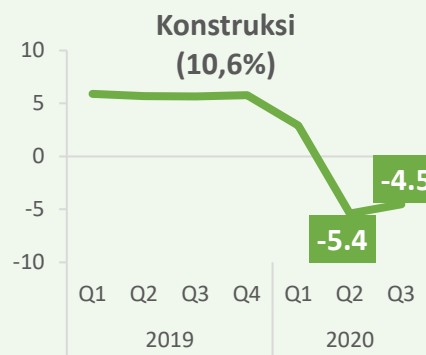
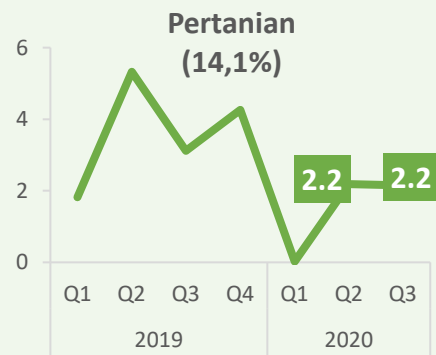
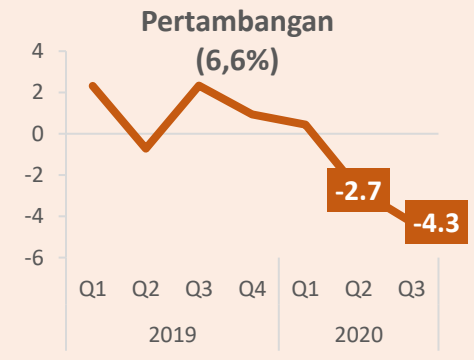
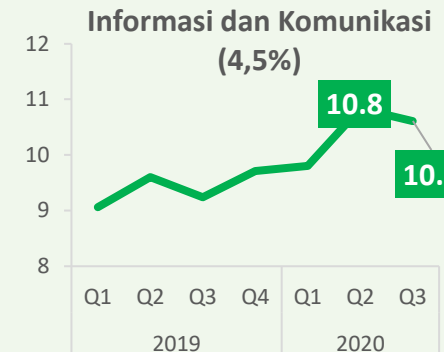
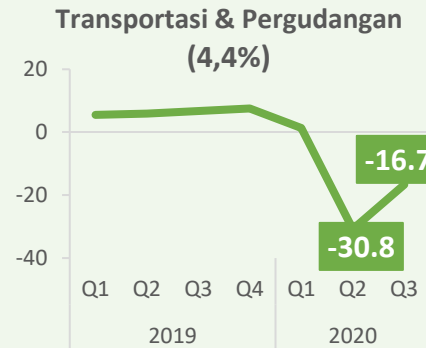
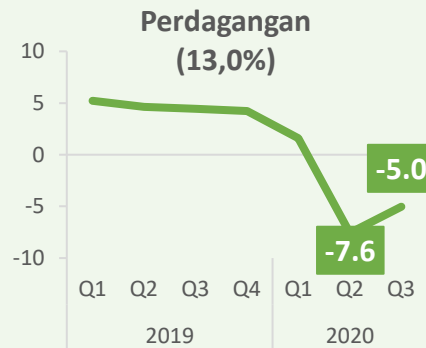
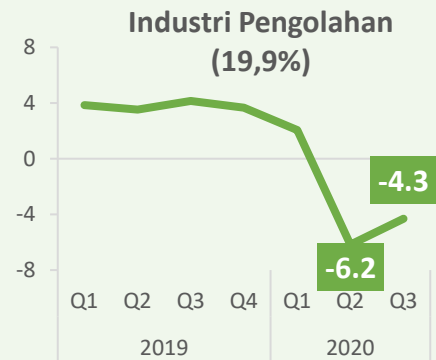
HAMPIR SEMUA SEKTOR MENGALAMI PENINGKATAN PERTUMBUHAN

Langkah pemulihan dunia usaha terus perlu didorong

Sektor kontributor utama & yang terdampak pandemi sangat dalam mampu mencatat perbaikan signifikan & menunjukkan pembalikan arah

Sektor yang tetap tumbuh tinggi di tengah pandemi

Sektor yang melemah dibanding Q2



Keterangan: Angka di bawah nama sektor adalah *share* sektor terhadap PDB Harga Berlaku 2019, Angka pada Grafik Garis adalah Pertumbuhan Riil Sektor tersebut *Year on Year*

BIAYA PENANGANAN COVID-19 dan PEN Rp695,21T

Kesehatan



Rp87,55 T

- Belanja Penanganan Covid-19
- Insentif Tenaga Medis
- Santunan Kematian
- Bantuan Iuran JKN
- Gugus Tugas Covid-19
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan

Perlindungan Sosial



Rp203,96T

- PKH
- Sembako
- Bansos
- Pra Kerja
- Diskon Listrik
- Logistik / Pangan / Sembako
- BLT Dana Desa

Sektoral K/L & Pemda



Rp106,05 T

- Program Padat Karya K/L
- Insentif Perumahan
- Pariwisata
- DID Pemulihan Ekonomi
- Cadangan DAK Fisik
- Fasilitas Pinjaman Daerah
- Cadangan Perluasan

UMKM



Rp123,47 T

- Subsidi bunga
- Penempatan Dana untuk Restru
- Belanja IJP
- Penjaminan untuk Modal Kerja
- PPh Final UMKM DTP
- Pembiayaan Investasi Koperasi LPDB KUMKM

Pembiayaan Korporasi



Rp53,57 T

- Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya
- PMN
- Investasi untuk Modal Kerja

Insentif Usaha

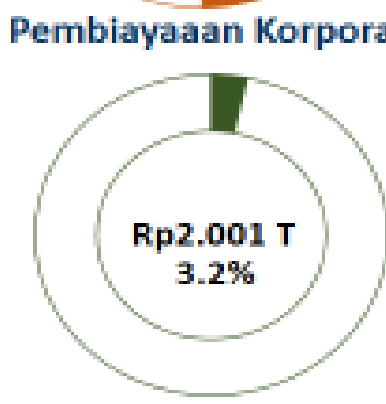
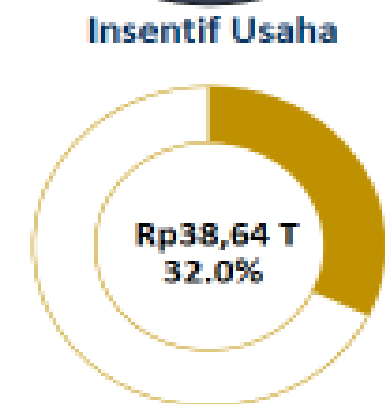
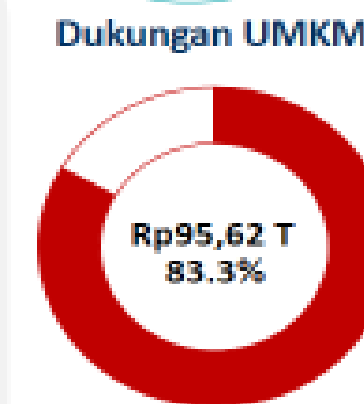
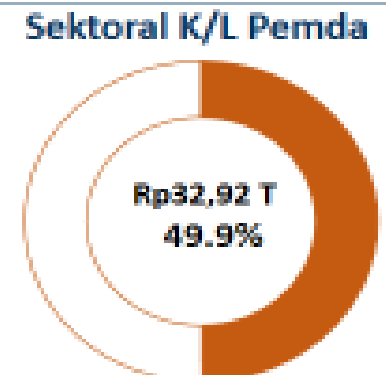
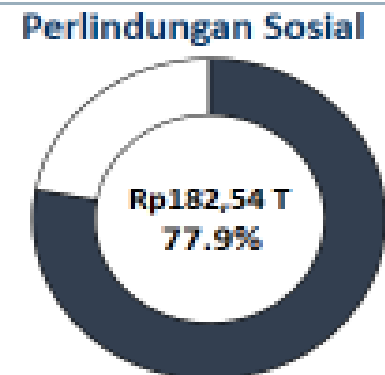
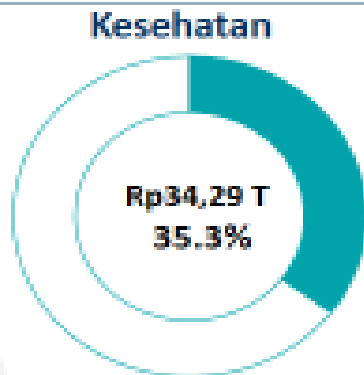


Rp120,61T

- PPh 21 DTP
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Pengurangan Angsuran PPh 25
- Pengembalian Pendahuluan PPN
- Penurunan Tarif PPh Badan
- Stimulus Lainnya

Realisasi Penanganan COVID dan PEN – 11 Nov

Pagu Rp695,2 T
Realisasi Rp386,01 T
(55,5% dari Pagu)



- Realisasi s.d. bulan Okt sedikit melandai karena ada beberapa program yang sudah terserap hampir 100% (PKH, bantuan beras, dan kartu prakerja)
- Beberapa program baru akan tersalur pada November (subsidi bantuan gaji termin kedua) → penyerapan Nov meningkat signifikan, sudah 5,3% s.d. 9 Nov.

Audit Universe Penanganan COVID dan PEN - APBN

Perubahan Kedua Tambah Belanja & Pembayaan Rp695,2 T					
Sektoral & Pemda Rp106,11 T	Perlindungan Sosial Rp203,9 T	Inentif Usaha Rp120,61 T	UMKM Rp123,46 T	Pembayaan Korporasi Rp53,57 T	Penanganan Kesehatan Rp87,55 T
Program Padat Karya K/L Rp18,44 T	PKH Rp37,4 T	PPh 21 DTP Rp39,96 T	Subsidi Bunga Rp35,28 T	Penempatan Dana untuk Restru Pgdit Karya Rp3,42 T	Penanganan C-19 Rp65,8 T
Inentif Perumahan Rp1,3 T	Sembako Rp43,6 T	Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75 T	Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78 T	PMN 20,5 T	Inentif Tenaga Medis Rp5,9 T
Pariwisata Rp3,8 T	Bansos Jabodetabek Rp6,8 T	Pengurangan Anggaran PPh 25 Rp 14,4 T	Imbal Jasa Penjaminan Rp5 T	Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja Rp29,65 T	Santunan Kematian Rp0,3 T
DID Pemulihan Ekonomi Rp5 T	Bansos Non Jabodetabek Rp32,4 T	Pengembalian Pendahuluan PPh Rp5,8 T	Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) Rp1 T		Bantuan Iuran JKN Rp3 T
Cadangan DAK Fisik Rp8,7 T	Prakerja Rp20 T	Penurunan Tarif PPh Badan Rp20 T	PPh Final UMKM DTP Rp2,4 T		Gugas C-19 Rp3,5 T
Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10 T	Diskon Listrik Rp6,9 T	Stimulus Lainnya Rp26 T	Pembayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPOB KUMKM Rp1 T		Inentif Pajak Bidang Kesehatan Rp9,05 T
Cadangan Perluasan Rp58,87 T	Logistik/Pangan/Sembako Rp25 T				
	BLT Dana Desa Rp31,8 T				

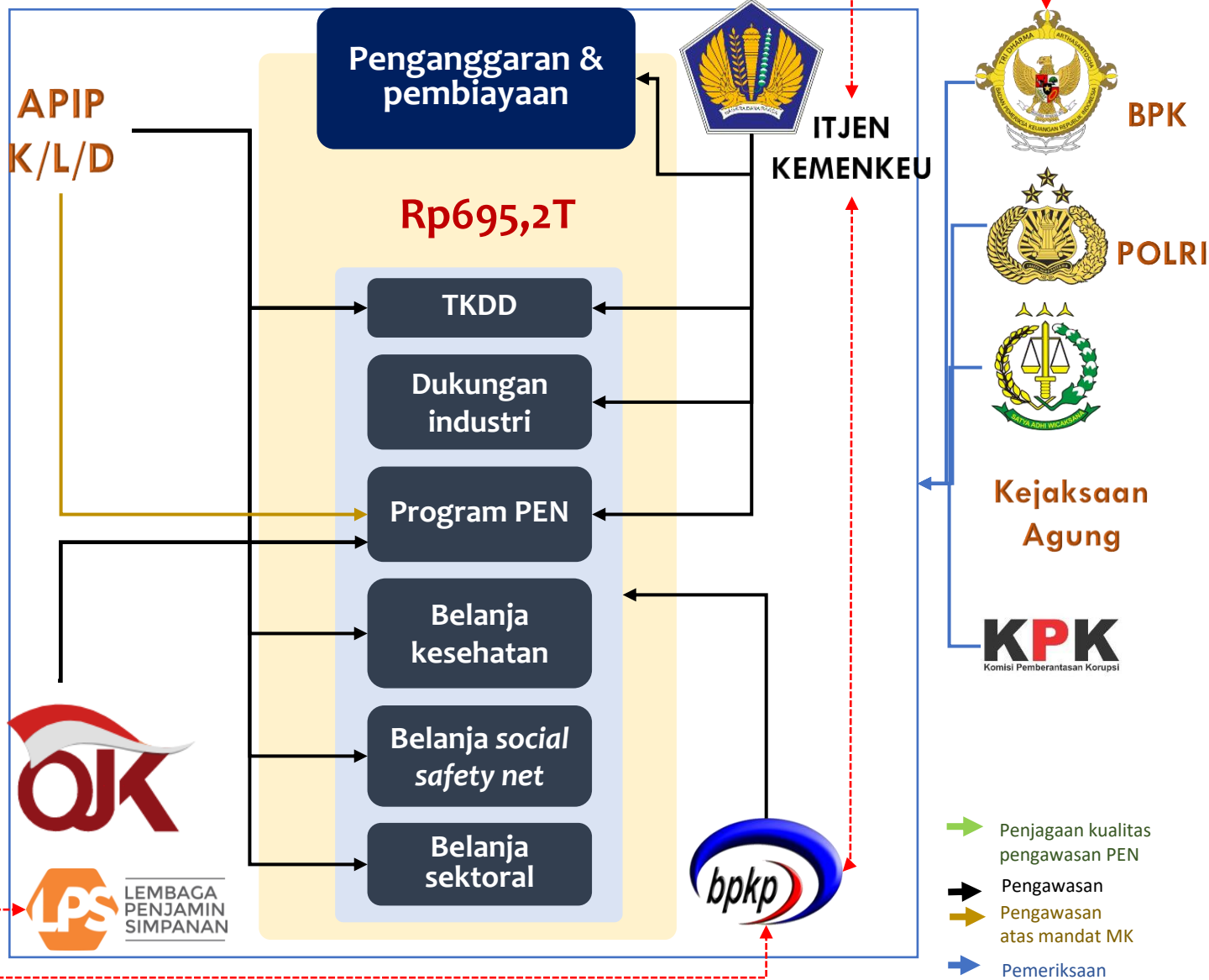
Pengawasan atas perumusan kebijakan	Audit / Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	Koordinasi Pengawasan dengan: Itjen Kem PUPR Itjen Kemhub Itjen Kemtan	Audit / Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	Koordinasi pengawasan dengan: Itjen Kemenparekre Itjen Kemen PUPR	Koordinasi pengawasan dengan: Itjen Kemko Perencanaan Itjen Kem ESDM Itjen Kem PUPR Itjen Kemdag Itjen Kemdikbud	Audit / Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	Koordinasi pengawasan dengan: Itjen Kemko Perencanaan Itjen Kemko Kemaritiman dan Investasi SPI BI SPI OJK SPI LPS Inspektorat KemBUMN	Koordinasi pengawasan dengan: Itjen Kemikes Itjen BNPB Gugus Tugas
		Audit / Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	Audit Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	Audit/Unit Eselon I (Klien Pengawasan)			Audit / Unit Eselon I (Klien Pengawasan)	
Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan peratanggungjawaban)	Koordinasi pengawasan dengan: Gugus Tugas Itjen BNPB Itjen Kemikes Itjen Kemlu Itjen Kem PUPR Itjen Kemtan Itjen Mabes TNI Itjen Polri Itjen K/L Lainnya	Koordinasi pengawasan dengan: Pemdes	DJKP	Koordinasi pengawasan dengan: SPI HIMBARA SPI PT POS SPI BULOG SPI PT PLN SPI Platform Digital	DJP		Koordinasi pengawasan dengan: SPI BUMN SPI Bank Peserta SPI Bank Pelaksana SPI Badan Usaha Penjaminan SPI Jamkrindo SPI Askrindo SPI PT Reasuransi Indonesia Utam	Koordinasi pengawasan dengan: SPI BPJS SPI RS. Faskes Pusat/Daerah SPI BPPSDM Kesehatan Inspektorat Daerah SPI Bank Pemerintah

Koordinasi pengawasan dengan BPKP

Framework Pengawasan Penanganan COVID-19 dan PEN

Koordinasi dan komunikasi yang konstruktif

- Forum AAIFI
- MoU Pengawasan
- Masukan RCM



Tujuan

Menjaga Respon Pemerintah Cepat, Efektif, dan Akuntabel

- Keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
- Pencegahan dan deteksi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang

Pengawasan Itjen Kemenkeu atas Program Penanganan Covid-19 dan PEN

KEP 29/2020 Pedoman Pengawasan atas Revisi Anggaran dan Penggunaan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya 999.08

Persiapan

- Kelengkapan dokumen
- Koordinasi

Pelaksanaan

- Penelaahan dokumen
- Pembahasan online
- Kesesuaian substansi materi revisi anggaran

Pelaporan



Hasil Reviu

KEP 30/2020 Pedoman PBJ Penanganan Covid-19

- Perencanaan
- Pelaksanaan Kontrak
- Pemilihan Penyedia

Pengawasan Pada Setiap Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa (Probit Audit)

Strategi Pengawasan Intern

- Pemanfaatan TIK secara maksimal
- Komunikasi hasil pengawasan melalui surel/video dokumentasi

PMK 204/2015 Pengawasan Belanja BUN

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran BA BUN dan Koordinasi dg APIP K/L/D

Risiko dan Pengendalian terkait Belanja Penanganan Covid-19 dan PEN

RISIKO

DATA PENERIMA

- data fiktif dan data kurang update
- Aplikasi belum mengakomodasi kebutuhan penyaluran
- Kebijakan teknis masih disusun

PROSES PENYALURAN

- Duplikasi/tidak tercantumnya penerima bantuan
- Keterlambatan Penyaluran
- Risiko *fraud* dalam penyaluran
- Ketidaksiapan pihak ketiga dalam memberikan jasa

PERTANGGUNGJAWABAN

- Dokumen dan Bukti pendukung kurang memadai
- Salah pencatatan dan penyajian
- Opini LKBUN/LKPP tidak WTP

EKSPEKTASI

MASYARAKAT
Realita di lapangan berbeda jauh dengan harapan masyarakat

PENGENDALIAN

- *Updating* database dan penyesuaian aplikasi
- Verifikasi berjenjang dari pemda/pihak yang berwenang
- Monitoring penyaluran melalui OMSPAN
- Pembukaan layanan informasi & pengaduan

Pengawasan Itjen Kemenkeu atas Program PEN (PMK Nomor 75/PMK.09/2020)

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

- Penyertaan Modal Negara
- Penempatan Dana
- Investasi Pemerintah
- Penjaminan; dan/atau
- Kebijakan PEN melalui belanja negara sesuai ketentuan Perundang-undangan

PMK PEDOMAN PENGAWASAN

- **Pedoman Pengawasan Intern**, mulai dari Perencanaan s.d. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut
- **Penjagaan Kualitas**

POLA KOORDINASI PENGAWASAN

1. **Koordinasi dan Sinergi Pengawasan** dalam: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan
2. **Penjaminan Kualitas** oleh Itjen Kemenkeu



Fokus Risiko

- Perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan
- Realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas
- Pertanggungjawaban tidak benar dan atau tidak didukung bukti yang memadai
- Menurunnya kepuasan masyarakat, serta menurunnya reputasi pemerintah

Terima Kasih